

Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Tahun 2019 di SMK Negeri Rowokangkung

Cici Maziyah¹, Wimbo², Sochib³

STIE Widya Gama Lumajang¹²³
Email cici.rwk@gmail.com¹

INFO ARTIKEL

Volume 2
Nomor 3
Bulan Maret
Tahun 2020
Halaman 207-213

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019 di SMK Negeri Rowokangkung bahwa alur pengelolaan dana BOS disusun dari : Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pengawasan dan Evaluasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Objek penelitian dilakukan pada SMK Negeri Rowokangkung. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan dokumentasi. Hasil analisis data diperoleh dari dokumentasi. Diamati mengenai Pengelolaan Dana BOS yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pengawasan dan Evaluasi. Dimulai dari Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disalurkan setiap Triwulan. Pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Buku Pembantu Kas (BPK), Buku Pembantu Bank (BPB), Buku Pembantu Pajak (BPP), form laporan BPK, realisasi penggunaan dana tiap jenis anggaran, rekapitulasi penggunaan inventaris barang, Buku Pembantu Umum (BKU), surat pertanggung jawaban, buku pembantu objek belanja. Dan yang terakhir Setelah pelaporan selesai lembaga dapat mengumpulkan hasil laporan ke Cabang Dinas Pendidikan. Setelah akhir tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas melakukan pengawasan ke lembaga yang dibawah naungan Cabang Dinas Pendidikan. Pengawasan Tim dari Pusat data langsung ke lembaga atau memberikan monitoring terhadap kepala sekolah dan bendahara BOS. Pegawai dilakukan guna melihat apakah dana sesuai dengan Rencana Anggaran.

Kata kunci: Efektivitas dan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

ABSTRACT

This study aims to determine the Effectiveness of the Management of School Operational Assistance Funds (BOS) in 2019 at Rowokangkung State Vocational School that the flow of BOS fund management is compiled from: Planning, Implementation, Reporting, Monitoring and Evaluation. This research is a descriptive quantitative research. The research object was conducted at Rowokangkung State Vocational School. Data in this study were collected using documentation. The results of data analysis were obtained from the documentation. Observed regarding BOS Fund Management which includes Planning, Implementation, Reporting, Monitoring and Evaluation. Starting with the School Budget Activity Plan (RKAS). The implementation of School Operational Assistance (BOS) funds is channeled every quarter. Reporting of School Operational Assistance (BOS) funds for Cash Assistance Books (BPK), Bank Assistance Books (BPB), Tax Assistance Books (BPP), BPK report forms, realization of the use of funds for each type of budget, recapitulation of the use of inventory items, General Support Books (BKU)), responsibility letter, shopping object

help book. And finally after the reporting is complete the institution can collect the results of the report to the Education Office Branch. After the end of the year the Supreme Audit Board (BPK), as the supervisor, supervises the institutions under the auspices of the Education Office Branch. Supervise the Team from the data center directly to the institution or provide monitoring of school principals and BOS treasurers. Supervisors are conducted to see whether the funds are in accordance with the Budget Plan.

Keywords: *Effectiveness and School Operational Assistance Funds.*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Untuk mengembangkan potensi yang optimal, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 berisi Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut menentukan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.

Adapun tujuan Umum diadakannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler yaitu (1) Membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia Sekolah; (2) Meringankan beban biaya operasi Sekolah bagi peserta didik pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; (3) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Menurut Peraturan dalam Mendiknas Nomor 1 Tahun 2018 standar biaya operasi non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) didirikan oleh Departemen Pendidikan Nasional dalam penyaluran, pelaksanaannya, dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Agama (Depag) sebagai departemen teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program. Biaya pendidikan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Biaya pendidikan ini yang akan digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan. Masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu untuk memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah-sekolah yang terdaftar. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut dengan BOS Nasional atau yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut BOS, selain BOS Nasional terdapat juga BOSDA (BOS Daerah) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah/Provinsi.

(Menteri Pendidikan, Kebudayaan, and Indonesia, 2019) Penggunaan dana yang pelaksanaannya sifatnya kegiatan, biaya yang dapat dibayarkan dari BOS Reguler meliputi pengadaan alat tulis kantor atau penggandaan materi, biaya penyiapan tempat kegiatan, honor narasumber lokal sesuai standar biaya umum setempat, dan/atau perjalanan dinas dan/atau penyediaan konsumsi bagi panitia dan narasumber apabila dibutuhkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan, salah satunya ialah *implementation problems approach*. Edwards (1980) mengatakan bahwa struktur birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan dalam implementasi kebijakan. Terdapat

dua aspek utama dalam birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP dapat diartikan sebagai rutinitas atau prosedur baku yang ditaati oleh sebuah organisasi dalam menjalankan tugas-tugasnya yang telah disusun. Sementara itu fragmentasi adalah ketidaksamaan pandangan atau sikap di antara para pelaksana kebijakan pada level yang berbeda-beda. Oleh karena *good governance* berpegang pada akuntabilitas, maka perlu ditetapkan indikator dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Para pengambil keputusan (*decision maker*) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholder*).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian *kuantitatif* metode *deskriptif*. Hamdi, Asep Saepul, and E. Bahrudin (2015) bahwa metode deskriptif mengkaji bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, persamaan, dan perbedaannya dengan fenomena yang lain. salah satu contoh antara lain adalah penelitian deskriptif di bidang pendidikan, kurikulum penelitian deskriptif untuk mengetahui fenomena – fenomena atau perubahan terhadap satu aktivitas atau suatu kejadian.

Metode yang dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang akan dilaksanakan di SMK Negeri Rowokangkung. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan dana BOS di SMK Negeri Rowokangkung. Penulis menggunakan penelitian kuantitatif untuk memahami suatu situasi, kondisi atau keadaan yang ada di SMK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SMK Negeri Rowokangkung merupakan SMK Negeri satu – satunya di Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang. SMK Negeri Rowokangkung berdiri pada tahun 2012 dengan luas tanah 16.327 m² sebagai SMK Rintisan yang dikembangkan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) daerah Lumajang, SMK Negeri Rowokangkung mendirikan 4 jurusan diantaranya adalah Agribisnis Perikanan Air Tawar, Tata Busana jurusan tersebut berdiri terlebih dahulu, lalu ditahun berikutnya mendirikan jurusan Multimedia dan Teknik Bisnis Sepeda Motor. Saat ini SMK Negeri Rowokangkung dipimpin oleh Kepala Sekolah Ibu Lilik Majidatut Zahro, MPd dan Bendaharanya Bapak Muhammad Machmud, S.Pd.

Sebagian besar peserta didik yang bersekolah di SMK Negeri Rowokangkung berasal dari keluarga dengan taraf ekonomi rendah dengan penghasilan kurang dari satu juta perbulan. Orang tua peserta didik mayoritas bekerja sebagai buruh dan petani, sehingga sangat berpengaruh jika suatu unit sekolah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna menunjang pendidikan siswa, prasarana sekolah dan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Di SMK Negeri Rowokangkung terdiri dari Guru PNS berjumlah 12 orang, Guru Honorer 21 orang, tenaga Administrasi 6 orang (Tenaga Honorer), Pesuruh 2 orang (Tenaga Honorer), dan penjaga kantin 1 orang (Tenaga Honorer).

Pada Penelitian ini data diperoleh dengan datang langsung ke sekolah guna melakukan dokumentasi data yang diperlukan yaitu data pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2019.

Tabel 1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

KEGIATAN	BELANJA	NOMINAL
Pengembangan Perpustakaan	Belanja Buku Teks	23.000.000
Penerimaan Peserta Didik Baru	K-13 Untuk Siswa	7.425.000
Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler		100.800.000
Kegiatan Evaluasi Pembelajaran		50.800.000
Pengelolaan Sekolah		91.100.000
Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga		
Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen		3.650.000
Sekolah		
Langganan Daya dan Jasa		49.100.000
Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana		88.600.000
Sekolah		
Pembayaran Honor		4.100.000
Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran		63.400.000
Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan		
Sertifikasi Kejuruan		0
Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK		10.500.000

dan/atau Praktek Kerja Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dalam Negeri dan Pemagangan		
	Total Penggunaan	492.475.000

Tabel 2. Jumlah Pencairan

TRIWULAN	NOMINAL
Triwulan I	97.620.000
Triwulan II	195.840.000
Triwulan III	88.230.000
Triwulan IV	101.110.000

Tabel 3. Pelaksanaan/Realisasi

KEGIATAN	BELANJA	RKAS	REALISASI
Pengembangan Perpustakaan	Belanja Buku Teks K-13 Untuk Siswa	23.000.000	23.000.000
Penerimaan Peserta Didik Baru		7.425.000	7.425.000
Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler		100.800.000	100.800.000
Kegiatan Evaluasi Pembelajaran		50.800.000	50.800.000
Pengelolaan Sekolah		91.100.000	91.100.000
Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah		3.650.000	3.650.000
Langganan Daya dan Jasa		49.100.000	49.100.000
Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah		88.600.000	78.925.000
Pembayaran Honor		4.100.000	4.100.000
Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran		63.400.000	63.400.000
Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan		0	0
Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dan/atau Praktek Kerja Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dalam Negeri dan Pemagangan		10.500.000	10.500.000
Total Penggunaan		492.475.000	482.800.000

Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana

Laporan disusun oleh operator bendahara BOS beserta bendahara BOS berdasarkan BKU dari semua sumber dana yang dikelola Sekolah. Laporan dibuat tiap triwulan dan ditandatangani oleh bendahara, kepala Sekolah, dan Komite Sekolah.

Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS Reguler yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS Reguler. Bukti pengeluaran yang sah disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Laporan ke Dinas Pendidikan Tim BOS Reguler Sekolah harus menyampaikan dokumen laporan kepada tim BOS Reguler Provinsi untuk SMK. Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut merupakan kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS Reguler tiap triwulan. Kompilasi laporan ini diserahkan paling lama tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Selain laporan di atas, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah harus menyampaikan laporan hasil belanja dari BOS Reguler dan penerimaan barang aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Laporan Daring ke Laman BOS Reguler. Selain laporan berupa dokumen cetak yang disampaikan ke dinas pendidikan, tim BOS Sekolah juga harus menyampaikan laporan penggunaan dana secara daring ke laman BOS Reguler <http://bos.kemdikbud.go.id>. Informasi penggunaan dana yang disampaikan sebagai laporan daring merupakan informasi yang didapat dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS Reguler tiap triwulan. Laporan ini harus diunggah ke laman BOS tiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

Pengawasan

Setelah pelaporan selesai lembaga dapat mengumpulkan hasil laporan ke Cabang Dinas Pendidikan kemudian dari hasil pengumpulan Cabang Dinas Pendidikan mengecek pelaporan agar diketahui kesalahan laporan tersebut. setelah akhir tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas melakukan pengawasan ke lembaga yang dibawah naungan Cabang Dinas Pendidikan.

Hasil dari penelitian perencanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah sudah menunjukkan terlaksananya dengan baik meski ada beberapa realisasi dana yang belum efektif dalam pencairannya. Data yang diperoleh dari Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan peraturan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Perencanaan pengelolaan dana BOS di mulai dari penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKAS) yang disusun setiap awal tahun pelajaran. Sehingga dipertengahan tahun terjadi perubahan RKAS. Perubahan RKAS dapat terjadi apabila terdapat siswa berhenti, mutasi dan siswa baru. Sehingga dapat mempengaruhi besarnya dana BOS yang diterima pada tahun 2019. Dan untuk mengidentifikasi kebutuhan sekolah yang didanai oleh dana BOS, maka perlu penyusunan setiap tahun ajaran sekolah agar memenuhi kebutuhan alokasi dana BOS disesuaikan dengan prioritas kebutuhan sekolah.

Kegiatan yang dilakukan pada pencairan yaitu dana yang masuk pada rekening SMK Negeri Rowokangkung yang dalam pencairannya bertahap pada triwulan pencairan. Setelah dana BOS turun dan cair pihak Kepala sekolah memberi informasi kepada bendahara. Pencairan dana BOS dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara. Apabila kepala sekolah tidak bisa mencairkan maka dilakukan oleh bendahara dengan syarat membawa surat kuasa. Dan setelah dana diterima kemudian dibelanjakan sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah. Setiap pembelanjaan disertai tanda bukti fisik seperti kwitansi, nota dan tanda bukti lainnya. Guna untuk dilampirkan pada pelaporan penggunaan dana BOS.

Setelah pelaporan selesai lembaga dapat mengumpulkan hasil laporan ke Cabang Dinas Pendidikan kemudian dari hasil pengumpulan Cabang Dinas Pendidikan mengecek pelaporan agar diketahui kesalahan laporan tersebut. setelah akhir tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas melakukan pengawasan ke lembaga yang dibawah naungan Cabang Dinas Pendidikan. Pengawasan Tim dari Pusat data langsung ke lembaga atau memberikan monitoring terhadap kepala sekolah dan bendahara BOS. Pegawai dilakukan guna melihat apakah dana sesuai dengan Rencana Anggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang sudah di laksanakan dan telah dipaparkan maka agar dapatnya ditarik kesimpulan bahwa Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) d SMK Negeri Rowokangkung terdiri dari Perencanaan, pelaksanaan, Pelaporan, Pengawasan dan Evaluasi. Dimulai dari Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disalurkan setiap Triwulan. Pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Buku Pembantu Kas (BPK), Buku Pembantu Bank (BPB), Buku Pembantu Pajak (BPP), form laporan BPK, realisasi penggunaan dana tiap jenis anggaran, rekapitulasi penggunaan inventaris barang, Buku Pembantu Umum (BKU), surat pertanggung jawaban, buku pembantu objek belanja. Bukti pengeluaran harus didukung oleh bukti transaksi pengeluaran uang dalam jumlah tertentu yang harus dibubuhi oleh materai sesuai dengan pihak yang bersangkutan. Dan yang terakhir Setelah pelaporan selesai lembaga dapat mengumpulkan hasil laporan ke Cabang Dinas Pendidikan kemudian dari hasil pengumpulan Cabang Dinas Pendidikan mengecek pelaporan agar diketahui kesalahan laporan tersebut. setelah akhir tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas melakukan pengawasan ke lembaga yang dibawah naungan Cabang Dinas Pendidikan. Pengawasan Tim dari Pusat data langsung ke lembaga atau memberikan monitoring terhadap kepala sekolah dan bendahara BOS. Pegawai dilakukan guna melihat apakah dana sesuai dengan Rencana Anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A Gede. (2014). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Malang:Aditya Media Publishing.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar- dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Mardalis. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistik Pendidikan Indonesia 2014*. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. (2014). *Petunjuk Teknis 2014 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK*. Direktorat Jendral

- Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. (2009). *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajar 9 Tahun*. Jakarta: Depdiknas.
- Bhawa, Gede Andreyan Semara, dkk. (2014). "Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada".
- Edward III, George C. (1980), *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, ashington.
- Ekonomi, Jurusan Pendidikan, Fakultas Ekonomi, and Dan Bisnis. 2014. 4 Tahun *Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Sukasada Gede Andreyan Semara Bhawa1, Iyus Akhmad Haris2, Made Artana3*.
- Fuad Hasan Achmad. 2019. *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus SMK 02 YP 17 Lumajang Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*.
- Hamdi, Asep Saepul, and E. Bahrudin. *Metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan*. Deepublish, 2015.
- Jan Kooiman (2003) *Gavnering as gavernance* sage.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014*.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)*.
- Kurniawan, Agung. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan. (2012). *Laporan Kajian Efektivitas Pemberian Dana BOS Tingkat SD dan SMP Negeri di Kota Medan Tahun Anggaran 2012*.
- "Lampiran_i_permendikbud_nomor_3_tahun_2019."
- Martani dan Lubis. (1987). *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Menteri Pendidikan, Dan, Kebudayaan, and Republik Indonesia. 2019. "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler." WWW.Jdih.Kemendikbud.go.id.
- Muhammad Rijal Fadil. (2019). "Pengaruh Bantuan Oprasional Sekolah (Bos) dan Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (BOSDA) Terhadap Keuangan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kabupaten Lumajang."
- Ni Wayan Parwati Asih, dkk. (2014). "Efektifitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Teknologi Nasional Denpasar". Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Nugroho, Riant. 2009, *Public Policy*, PT Elex Media komputindo
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta Human Development Report 2015. UNDP.
- Pendidikan, Kementerian, and Dan Kebudayaan. *Menetapkan PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69. 2009. *Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009*.
- Rahmad Hidayat. 2019. "Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Studi Di SDN 44 Mande Kota Bima."
- Renya Rosari Pankrasia. 2019. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SDN Kepatihan 3 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember."
- Setyorini Ninik, 2010 Implementasi Program BOS 2009 di Sekolah Negeri Pada Komisariat di SMPN I di ojonggede Kabupaten Bogor, Tesis Magister Ilmu Administrasi Publik UI, 2010
- Sudjana, Nana. (1990). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Kountour, Rony. (2005). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM. Schwab, Klaus. (2015). *The Global Competitiveness Report 2014-2015*. *World Economic Forum*
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kantor Menteri Sekretariat Negara.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan*.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. (1990). *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah*.
- Sekolah, Operasional et al. 2019. *Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sdn Kepatihan 3 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Skripsi*.
- Suharsimi Arikunto. (2009). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

- Stufflebeam, D.L. & Shinkfield, A.J. (1985). *Systematic Evaluation*. Boston: Kluwer Nijhof Publishing.
- Stufflebeam, D. (2003). *The CIPP model of evaluation*. In T. Kellaghan, D. Stufflebeam & L. Wingate (Eds.), *Springer international handbooks of education: International handbook of educational evaluation*. Retrieved from http://www.credoreference.com.ezproxy.lib.ucalgary.ca/entry/spredev/the_cipp_model_for_evaluation.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2008) *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2008). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Sukardi. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan Praktiknya)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru*. Surabaya: Mekar
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, Teori Aplikasi dan*